

POLITIK ATAS IDENTITAS AGAMA, DAN ETNIS DI INDONESIA

Muhamad Nurul Firdaus^{1,*}, Lusi Andriyani²

^{1,2} Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15419

*120120firdaus@gmail.com

ABSTRAK

Politik identitas di Indonesia menjadi sangat menarik untuk diteliti, karena seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak sekali budaya, agama, etnis, dan suku. Maka dari itu, politik identitas di Indonesia sangat mungkin sekali terjadi. Jenis pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebangkitan politik identitas di Indonesia terjadi karena adanya upaya pembangunan citra diri dan menegakkan harga diri antar suku, budaya, agama, dan etnis yang ada di Indonesia, sehingga menjadikan seseorang sebagai bagian dari salah satu golongan untuk memilih mereka yang seagama, sesuku, sebudaya, dan se etnis untuk masuk pemerintahan.

Kata kunci: Politik, Identitas, Suku, Budaya, Agama, Etnis.

ABSTRACT

Identity politics in Indonesia is very interesting to study, because as we know that Indonesia is a country that has many cultures, religions, ethnicities, and tribes. Therefore, identity politics in Indonesia is very likely to occur. The type of approach used is a qualitative approach. The results show that the rise of identity politics in Indonesia occurs because of efforts to build self-image and uphold self-esteem between tribes, cultures, religions, and ethnicities in Indonesia, thus making a person part of one of the groups to choose those who are of the same religion, ethnicity, culture, and ethnicity to enter the government.

Keywords: Political, Identity, Tribe, Culture, Ethnicity.

1. PENDAHULUAN

Politik identitas merupakan alat perpolitikan yang digunakan oleh suatu kelompok seperti suku, etnis, budaya, agama atau sebagainya. Politik identitas merupakan alat politik yang digunakan untuk melakukan perlawanan atau juga digunakan sebagai alat untuk menunjukkan jati diri kelompok-kelompok tersebut. Identitas dapat dikendalikan atau dipolitisasi oleh orang-orang yang memiliki tujuan untuk mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok atau

individu-individu yang merasa sama, baik secara agama, RAS, budaya, etnis atau kesamaan lainnya. Politik identitas memiliki fokus pada permasalahan yang terkait dengan perbedaan-perbedaan yang tertuju pada fisik tubuh, pertentangan agama, etnisitas, budaya, ataupun bahasa yang digunakan. Politik identitas lahir karena adanya kepentingan minoritas yang termarjinalkan. Maka dari itu, politik identitas hadir sebagai wadah aspirasi bagi yang tertindas.

Indonesia merupakan Negara dengan kepulauan terluas di dunia. Indonesia memiliki jumlah pulau lebih dari 17.000, bahasa lokalnya yang ratusan, bahkan seperti papua saja tidak kurang dari 252 suku dengan bahasa khasnya masing-masing. Oleh karena itu, politik identitas yang selalu mencuat permukaan sejarah modern Indonesia harus dikendalikan dan diawasi secara bijak oleh pemikiran historis yang dipahami secara tepat dan cerdas. Ketika proklamasi, Indonesia memiliki jumlah penduduk sekitar 70 juta, pada awal abad ke-21 bertambah menjadi 250 juta, ini merupakan pertumbuhan yang membengkak lebih dari tiga kali lipat dari awal kemerdekaan Indonesia. Indonesia telah muncul sebagai Negara terbesar keempat setelah cina, india, dan amerika. Indonesia yang memiliki beranekaragam budaya, suku, etnis, dan agama yang berbeda dapat saling bertoleransi dan menghargai antar perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing kelompok. Oleh karena itu perlu adanya analisis terkait terjadinya politik identitas di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan mengambil berbagai referensi data dan berita dari buku, jurnal ataupun laman berita-berita online yang terpercaya. Selanjutnya dilakukan pembagian domain menjadi satu dengan menganalisis pola-pola yang ditemukan berdasarkan data lapangan serta membahasnya berdasarkan dengan data dan fakta yang fokus kepada masalah politik identitas yang menjadi sebab akibat munculnya stigma-stigma atau tuduhan radikal, teroris dan diskriminasi ras terhadap kelompok masyarakat tertentu lalu mengambil kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan.

3. PEMBAHASAN

Politik Identitas Agama

Kewajiban setiap warga negara Indonesia yang tertuang dalam pancasila pada urutan pertama adalah ketuhanan yang maha esa, Ini memiliki arti bahwa setiap warga negara indonesia

memiliki kewajiban untuk beragama, untuk memiliki tuhan sebagai sesembahannya. Agama di indonesia yang diakui oleh pemerinah ada 6, yaitu Islam, protestan, katolik, hindu, budha, dan konghucu.

Politik identitas terlebih lagi dalam hal agama memang tidak pernah hilang dalam dunia politik di Indonesia ini. Pada ajang pemilihan Gubernur Jakarta pada tahun 2017 yang lalu adalah contoh nyata sebagai bukti pernyataan tersebut. Pada saat itu beredar sebuah isu dimasyarakat yang menjadi sorotan masyarakat DKI Jakarta bahkan seluruh masyarakat Indonesia, yaitu ucapan Ahok yang merupakan salah satu calon gubernur yang mengatakan “Kita telah dibohongi oleh surat al-ma’idah ayat 51” yang kemudian menyulut amarah ummat islam sehingga namanya menjadi buruk dimata orang islam. Ini merupakan salah satu kasus yang terkait dengan politik identitas, yang bisa disimpulkan bahwa seseorang bisa menarik perhatian identitas lain agar mendapat dukungan, namun jika seseorang tersebut dianggap salah ketika ingin mendapatkan dukungan, justru ini sebaliknya bisa menjadi petaka baginya. Banyak kalangan kemudian menarik kesimpulan bahwa Indonesia sedang mengalami potensi konflik baru yakni antara negara dan agama, utamanya jika berkaca pada tingginya tensi politik pada pemilihan gubernur Jakarta.

Politik identitas ternyata tidak hanya terjadi pada pilgub DKI Jakarta saja, pada pemilihan presiden 2019 juga terjadi hal serupa. Pada saat itu Jokowi telah mengambil keputusan untuk memilih Ma’ruf Amin sebagai wakilnya di pilpres 2019. Jokowi mengatakan bahwa dirinya sudah mendapatkan persetujuan dan masukan dari berbagai elemen masyarakat, seperti para ulama, ketua umum partai, pengurus partai, dan relawannya. Alasan Jokowi memilih Maruf Amin karena Maruf Amin dianggap sebagai agamawan yang bijaksana, selain itu juga pengalaman Ma’ruf Amin di pemerintahan. Dari alasan Jokowi tersebut sangat jelas dan dapat

disimpulkan bahwa agama memang yang akan menjadi senjata dan peredam politik identitas yang mungkin akan dilakukan oleh lawan politik dengan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan.

Mau tidak mau atau suka tidak suka, memang politik identitas di Indonesia masih banyak digunakan oleh elit politik untuk memenangkan kompetisi politik. Identitas sebagai batas pemisah mereka yaitu salah satunya adalah agama. Misalnya saja bicara terkait elektabilitas Jokowi-Maruf Amin, diawal keputusan mereka menjadi pasangan pilpres elektabilitas Jokowi menurun terutama berkurang pada pemilih non-muslim, akan tetapi mengalami peningkatan pada pemilih muslim. Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia seakan menjadi barometer untuk para elit politik memenangkan persaingan politik. Terkait elektabilitas pun demikian lambat laun elektabilitas Jokowi meningkat karena pemilih muslim.

Inilah bukti nyata yang menjadikan politik identitas sangatlah penting dan masih diminati sampai saat ini oleh para elit politik. Politik identitas memang mampu menjadi kekuatan yang sangat besar untuk memenangkan kompetisi politik. Maka dari itulah banyaknya para elit politik yang menggunakan agama sebagai identitas untuk mendapatkan dukungan penuh.

Politik Identitas Etnis

Maluku

Jika kita lihat dari sejarah perkembangan praktik politik identitas etnis saat ini, lebih banyak melibatkan aktor dan struktur, serta mengakibatkan penguatan ego atas etnis dan budaya masing-masing yang ada di Maluku utara. Dengan menunjukkan kekuatan yang secara alamiah yang teris terjaga kepentingannya. bahwa kepentingan kelompok yang dominan erat berkaitan dengan pelestarian status quo. Dengan demikian, bentuk-bentuk makna yang menaturalisasikan kondisi yang telah ada dengan menghambat pengakuan atas

sifat masyarakat manusia yang dapat diubah dan berciri historis berperan untuk melanggengkan kepentingan semacam itu. (Giddens,2009).

Politik identitas etnis yang terjadi pada pemilihan gubernur Maluku Utara 2013 merupakan realitas politik yang jelas dikonstruksi oleh para aktor informal dan struktur partai politik, serta struktur pemerintahan untuk menunjukkan semangat etnis dalam meraih dukungan politik dari masyarakat atau pun etnisnya. Oleh karena itu, politik identitas yang dibangun adalah dengan menampilkan etnisnya sebagai modal utama dalam PILKADA Maluku Utara yang pada intinya memiliki kemungkinan bagi para aktor untuk mengkonstruksi identitas sebagai langkah untuk menggeser kekuatan elit yang memiliki peran politiknya dalam PILKADA Maluku Utara yang selalu diperhitungkan. Di sisi lain, munculnya organisasi mahasiswa dan masyarakat pada PILKADA Maluku Utara menjadi sebuah perwujudan yang konkret akan lemahnya partai politik dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga politik yang berkewajiban melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat. Maka dari itu, partai politik dianggap gagal yang menjadikan dukungan masyarakat pun minim.

Tionghoa

Tionghoa adalah sebutan yang biasa diucapkan kepada orang yang berketurunan china. Etnis tionghoa tersebar di beberapa negara seperti philipna atau di thailand, dimana etnis tionghoa sendiri sudah berakulturasi menjadi penduduk pribumi. Di indonesia sendiri sepertinya masih berlaku pendiskreditan dengan istilah pribumi dan non-pribumi untuk membedakan antara etnis tionghoa dengan etnis pribumi. Akan tetapi, sepertinya pengecapan ini tidak berlaku kepada para pendatang dari Indi dan Arab. Walaupun sebenarnya orang tionghoa sudah memiliki keturunan di indonesia selama ratusan tahun.

Pada zaman pemerintahan belanda perbedaan status etnis diberlakukan secara ketat dan tegas. Orang eropa deiberikan status tertinggi dan memiliki hak dan difasilitasi terbaik. Sedangkan orang tionghoa yang pada saat itu disebut sebagai orang timur asing memiliki status terendah di bawah orang eropa sama seperti masyarakat pribumi. Ini merupakan suatu tindakan yang memang sengaja diakukan oleh para penjajah belanda untuk memisahkan etnis tionghoa dan etnis pribumi yang dinamakan “David and Rule”.

Politik “David and Rule” yang diberlakukan kepada etnis tionghoa nampaknya berlangsung secara lama sampai pada zaman penjajahan jepang. Penjajahan jepang melakukan pemisahan dan pemaksaan terhadap etnis tionghoa untuk belajar disekolah khusus yang dibuat oleh jepang.

Namun sepertinya situasi nampak berbeda ketika memasuki masa kemerdekaan. Tionghoa pada saat itu sepertinya terjepit dengan berbagai kepentingan, baik itu dalam skala nasional ataupun internasional. Bahkan sebuah undang-undang yang telah mengatur hal itu ditengarai akan membatasi populasi etnis tionghoa bisa menjadi warga negara indonesia.

Penelusuran posisi etnis tionghoa mendapatkan titik temu setelah munculnya keppres no.6 tahun 2000 yang diumumkan pada 18 januari 2000 oleh presiden Gus Dur, yang sekaligus dicabutnya inpres no.18 tahun 1967. Yang artinya tidak lagi diperlukannya izin khusus untuk mengekspresikan secara publik berbagai aspek dari identitas etnis, kepercayaan, kebudayaan, dan tradisi asli mereka.

Sejak saat itulah sesuatu yang identik dengan tionghoa mulai mendapatkan posisi di indonesia.

4. KESIMPULAN

kemenangan pada kontestasi pilkada dan pemilihan presiden. Politik identitas merupakan

sebuah trik politik yang masih diminati sampai sekarang, pandangan ini biasa terjadi pada kontestasi politik untuk memperoleh kemenangan. Bahkan pada pemilihan presiden kemarin sangat terlihat jelas politik identitas ini dilakukan. Tidak aneh memang, karena Negara Indonesia memiliki ragam budaya, suku dan agama, hal inilah yang menjadi tolak ukur seseorang untuk dapat memenangkan kontestasi politik.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Saputra (2018), Agama dan Negara: Menuju Pilpres 2019, <https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/asketik/article/view/912>

Endang sari, (2016), Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta, <https://journal.unhas.ac.id/index.php/kritis/article/view/4164>

Fitri Eriyanti (2006), Dinamika Posisi Identitas Etnis Tionghoa dalam Tainjauan Teori Identitas Sosial, <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/1068>

Hasse Jubba, Muh Rafi, Zuly Qodir (2021), Politik Identitas Melayu Islam sebagai Upaya Mewujudkan Budaya Berintegritas, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/politicon/article/view/11481>

Ikwan Setiawan, Albert Tallapessy, Andang Subaharianto (2016), Politik Identitas Etnis Pasca Reformasi: Studi Kasus Pada Komunitas Tengger dan Using, <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/73697>

Kamarudin Salim (2015), Politik identitas di Maluku Utara, <http://journal.unas.ac.id/politik/article/view/155/Indonesia%20pdf>

Kristianus (2016), Politik dan Strategi Budaya Etnik Dalam Pilkada serentak di Kalimantan Barat, <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpi/article/view/9182/0>

Politik identitas sering kali di

Lusi Andriyani. 2008. Islam dan Politik Identitas (Studi Politik Identitas Partai Keadilan Sejahtera di Era Reformasi), Tesis, Universitas Airlangga. <https://repository.unair.ac.id/38213/>

Nafik Muthohirin (2019), Politik Identitas Islam dan Urgensi Pendidikan Multikultural, <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jpai/article/view/8776>

Rendy Adiwilaga (2019), Pemilu dan Keniscayaan Politik Identitas Etnis di Indonesia Tinjauan Teoritis, <https://library.unibba.ac.id/2019/01/17/pemilu-dan-keniscayaan-politik-identitas-etnis-di-indonesia-sebuah-tinjauan-teoritis-oleh-rendy-adiwilaga-s-ip-m-sc/>